

Kekuasaan dan Politik Lembaga Pendidikan Islam

Rofik Aksan

MTsN 2 Tanah Laut

email Korespondensi : rofikaksan@gmail.com

Abstrak: Dunia politik dan kekuasaan telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam pengambilan kebijakan di segala bidang, hal ini juga terjadi dalam dunia pendidikan Islam. Lembaga Pendidikan Islam yang begitu luas tersebar di seluruh tanah air tentu saja menjadi isu strategis dalam kekuasaan dan politik. Tujuan artikel ini disusun untuk mengetahui sejauh mana pendidikan Islam mempengaruhi dan dipengaruhi kekuasaan dan politik di Indonesia. Artikel ini membahas beberapa hal mengenai dunia politik di Lembaga Pendidikan Islam dan membahas hubungan politik kekuasaan dengan pendidikan Islam di Indonesia, urgensi politik pendidikan Islam dan posisi pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, beberapa isu juga akan dibahas antara lain Kekuatan Pendidikan, Politik dan Kekuasaan dalam Pendidikan, Pendidikan Islam di Indonesia, Pola Pendidikan di Indonesia, serta empat isu yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan berbasis kekuasaan, yaitu, domestikasi dan kebodohan, indoktrinasi, demokrasi pendidikan, dan integrasi sosial.

Kata Kunci: *kekuasaan, pendidikan islam, politik*

Abstract: the world of politics and power has become inseparable in policy making in all fields, this also happens in the world of Islamic education. Islamic Educational Institutions that are so widely spread throughout the country are of course a strategic issue in power and politics. The purpose of this article is to find out the extent to which Islamic education influences and influences power and politics in Indonesia. This article discusses several things about the political world in Islamic Education Institutions and discusses the relationship between power politics and Islamic education in Indonesia, the political urgency of Islamic education and the position of Islamic education in Indonesia. In addition, several issues will also be discussed including the Strength of Education, Politics and Power in Education, Islamic Education in Indonesia, Education Patterns in Indonesia, as well as four issues that are closely related to the implementation of power-based education, namely, domestication and ignorance, indoctrination, democracy education, and social integration.

Keywords: *power, islamic education, politics*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, sebab dengan adanya proses pendidikan manusia dapat meraih kemanusiaanya secara hakiki. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Dinas Pendidikan, 2005a).

Sedangkan menurut Dewantara (1977) Pendidikan yaitu: tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Senada dengan pengertian di atas, Anas Salahudin (2011) mendefinisikan pendidikan dengan proses mendidik, membina mengendalikan mengawasi, mempengaruhi dan mentransmisikan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan oleh para pendidik kepada anak didik untuk membebaskan kebodohan, meningkatkan pengetahuan dan membentuk kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan usaha dan upaya para pendidik yang bekerja secara interaktif dengan peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memajukan kecerdasan dan keterampilan semua orang yang terlibat dalam Pendidikan.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa proses pendidikan memerlukan semua orang termasuk institusi, lembaga dan pemerintahan yang berkaitan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendukung secara optimal proses pendidikan sehingga tujuan dan esensi pendidikan dapat tercapai dengan lebih maksimal.

Dewasa ini, proses pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya, salah satu penyebabnya adalah sistem Pendidikan yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan zaman (Basir & Ramadan, 2017), bahkan sekolah dianggap gagal dalam menjalankan perannya (Purnamasari, 2017; Ramadan & Mof, 2022). *Gap* ini pada akhirnya mengakibatkan terjadinya *mis-education*, antara pendidik dan peserta didik. Hal tersebut sangat terlihat ketika terjadi penurunan kualitas pencapaian dalam pendidikan seperti tingkah laku peserta didik yang tidak mencerminkan budi pekerti yang baik, bahkan tidak jarang berita-berita terkait tindak kekerasan peserta didik terhadap pendidik atau sebaliknya, fenomena ini menguatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pengetahuan yang dimiliki dan perilaku pelaku-pelaku pendidikan (Ramadan, 2020). Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darussalam Pontianak Timur, seorang guru dipukul murid menggunakan kursi karena menegurnya yang asyik bermain ponsel saat jam pelajaran (Irawan, 2018). Adapun kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh guru, seperti yang terjadi di SMP 1 Camplong Sampang Jawa Timur pada Bulan September tahun 2021 (Febriana, 2022).

Kejadian tersebut diatas mewakili sederet tindak kekerasan yang menyelimuti pendidikan di Indonesia yang seharusnya tidak lantas dihukumi sebagai bentuk kegagalan yang dilakukan oleh satu pihak tertentu, melainkan semua pihak yang berkaitan dengan proses pendidikan. Dalam hal ini pendidik dan sistem pendidikan menjadi sorotan utama karena pendidik merupakan oknum yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan, sedangkan sistem pendidikan merupakan cara atau metode yang diterapkan dan ditempuh oleh pendidik dalam menjalankan proses pendidikan. Sistem pendidikan sendiri adalah produk atau kebijakan dari pemerintah, jika boleh dikatakan pemerintah adalah oknum yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap sistem pendidikan. Pemerintah sendiri memiliki sumber kekuasaan dimana pemerintah berhak untuk mengatur kehidupan masyarakat guna menerapkan nilai-nilai kependidikan. Kekuasaan tersebut bersifat mengikat dan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari pemegang kekuasaan.

Secara historis, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perjalanan yang begitu panjang dari zaman kerajaan, kolonial, era kemerdekaan, dan pasca reformasi. Pada masa Portugis dan Spanyol mereka menyerbu Indonesia dengan dibarengi oleh misionaris yang diberi tugas untuk menyebarkan agama Nasrani di kalangan penduduk Indonesia. Salah satunya adalah Franciscus Xaverius yang dianggap

sebagai peletak batu pertama dari agama katolik di Indonesia yang hingga saat ini namanya masih melekat terutama pada institusi atau lembaga pendidikan katolik di Indonesia. Maka pada tahun 1536 Masehi, didirikanlah sekolah agama bagi anak-anak Ternate yang di dalamnya mempelajari tentang agama Nasrani, membaca, menulis dan berhitung (Danasuparta, 1959).

Pada zaman kolonial Belanda, tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang diadakan pada zaman Portugis dan Spanyol. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda memiliki tujuan politik tersendiri yaitu untuk menciptakan buruh tenaga kerja dengan upah rendah sehingga bisa membantu Belanda dalam mengeksploitasi daerah jajahannya. Mansyur menambahkan bahwa pada tahun 1830-1919 M merupakan tahun terjadinya kegiatan yang sangat menyengsarakan masyarakat pribumi terutama yang beragama Islam adanya kerja paksa (Daendels 1808 M) dan pengumpulan pajak (Raffles 1811-1816 M). Perbedaan agama, ras, suku, dan strata sosial terlihat nyata ketika sistem pendidikan kolonial Belanda diterapkan (Negara, 2016).

Seiring berjalannya waktu, perhelatan pendidikan juga ikut mengalami perubahan yang signifikan terutama saat adanya proklamasi yang menandai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan menjadi lebih mudah diperoleh bagi rakyat pribumi terutama bagi yang memeluk agama Islam. Hal tersebut dirasakan saat pendidikan tumbuh dan berkembang dari dalam rakyat itu sendiri melalui pesantren-pesantren yang diampu oleh para tokoh dan ulama. Sistem yang diterapkan dalam pesantren berbanding terbalik dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh kolonial Belanda atau bahkan Portugis. Perbedaan ras, suku, tidak menjadikan pembatas untuk memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan yang berkaitan dengan ilmu agama Islam. Meskipun, pendidikan di pasca kemerdekaan lebih bebas, masih saja ada polemik yang mendasar dan perlu untuk diadakan rekonstruksi bersifat *step by step* sehingga menghasilkan sistem yang benar-benar dapat mencapai esensi pendidikan.

Dari sedikit uraian tentang perjalanan sistem pendidikan di Indonesia di atas, terlihat bagaimana pemerintah (kekuasaan) tidak dapat terpisah dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan. Seperti dalam ilmu Biologi, hubungan antar makhluk hidup yang dikenal dengan istilah simbiosis. Istilah simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu: *mutualisme* (saling menguntungkan antar pihak), *parasitisme* (memberi keuntungan sepihak dan merugikan terhadap pihak lain), *komensalisme* (memberi keuntungan satu pihak dan tidak merugikan pihak yang lain). Begitu juga hubungan yang terjadi antara sistem pendidikan (kekuasaan) dan pendidikan, hubungan tersebut dapat dimungkinkan tergolong *mutualisme*, *komensalisme* atau bahkan *parasitisme*. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dipaparkan mengenai hubungan antara politik kekuasaan dan pendidikan Islam. Selain itu, juga akan dibahas sedikit uraian yang berkaitan dengan urgensi pendidikan Islam dan posisi pendidikan Islam saat ini di Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu proses penelitian yang berdasarkan pada metode meneliti atau mengamati suatu fenomena sosial dikalangan masyarakat. Artikel ini membahas beberapa hal mengenai dunia politik di Lembaga Pendidikan Islam dan membahas hubungan politik kekuasaan dengan pendidikan Islam di Indonesia, urgensi politik pendidikan Islam dan posisi pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, mengamati fenomena terkait kekuatan pendidikan, politik dan kekuasaan dalam pendidikan, pendidikan Islam di Indonesia, pola pendidikan di Indonesia, serta empat isu yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan berbasis kekuasaan, yaitu,

domestikasi dan kebodohan, indoktrinasi, demokrasi pendidikan, dan integrasi sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan dan Pendidikan

Makna kata politik memiliki berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan, atau segala urusan dan tindakan kebijaksanaan siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, atau lebih jauh dapat dimaknai sebagai ilmu untuk mendapatkan kekuasaan (Partanto & Al Barry, 1994).

Secara etimologi kekuasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan, kesanggupan, untuk berbuat sesuatu atau kekuatan, kewenangan atas sesuatu untuk menentukan, mengurus, mewakili dan sebagainya. Sedangkan secara terminologi kekuasaan merupakan kewenangan seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk mewakili, mengatur, memerintah, dan mempengaruhi sesuatu (Hoetomo, 2005b).

Masalah kekuasaan sangat menarik terutama dalam masyarakat modern. Dalam kehidupan sehari-hari manusia diatur oleh berbagai jenis kekuasaan seperti militer, ekonomi, politik dan lain-lain. Diantara berbagai jenis kekuasaan tersebut, kekuasaan dalam bidang politik lebih mendapat perhatian khusus masyarakat. Padahal kekuasaan politik hanya bagian kecil dari apa yang disebut kekuasaan sosial.

Arif Rohman dalam bukunya menjelaskan bahwa negara itu memiliki kekuasaan politik untuk memaksa masyarakatnya secara sah untuk mengatur dan memerintah. Disamping itu, kekuasaan politik membutuhkan sumber-sumber untuk mendukung kekuasaannya. Contoh sumber kekuasaan yang diperlukan berupa sarana paksaan adalah senjata, penjara, kerja paksa, teknologi, pendidikan, sistem mengikat dan aparat. Dengan senjata dan sumber-sumber tersebut pemerintah dapat memfungsikan untuk menumbangkan segala jenis penentang kekuasaan termasuk pendidikan yang bisa juga dijadikan sebagai alat pelanggeng kekuasaan (Rohman, 2012).

Relasi Politik Kekuasaan dan Pendidikan

Sirozi (2005) menegaskan bahwa hubungan antara politik kekuasaan dan pendidikan terwujud kedalam bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik *setting* sosial politik dimana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Dalam suatu masyarakat, hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan nyata, dan dalam masyarakat yang lainnya hubungan tersebut bisa saja melemah dan tidak nyata. Pola hubungan antara pendidikan dan politik kekuasaan di negara-negara berkembang berbeda-beda dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya sesuai dengan pola yang dibentuk oleh kekuasaan yang ada.

Di dunia pendidikan islam, politik kekuasaan memiliki keterkaitan yang terlihat jelas. Sejarah peradaban Islam, banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan, dalam upaya memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pendidikan islam banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan. Mengapa demikian, karena tujuan pemerintahan islam adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dan hal tersebut tidak akan mampu ditegakkan tanpa melaksanakan syariat. Sedang syariat tidak dapat ditegakkan tanpa umat yang paham tentang syariat (Sirozi, 2005).

Jika kekuasaan dimaknai dengan pemerintah yang berdaulat maka setidaknya relasi yang terbangun di dalamnya adalah pendidikan islam merupakan kebutuhan negara. Oleh karena itu, kekuasaan dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan

proses pendidikan islam berdasarkan tujuan pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat sepenggal kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang memberikan isyarat bahwa jika kemerdekaan yang sesungguhnya ingin diraih maka negara harus mencerdaskan bangsanya (Rifai, 2011).

Jika dicermati lebih lanjut, pemerintah telah memberikan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia (2016).

Dari pemaparan Undang-Undang dasar di atas, pemakalah menilai bahwa pemerintah telah memberikan kepedulian yang sangat besar terkait pendidikan Islam. Bahkan jika melihat lebih teliti, pemerintah cenderung menggunakan nilai-nilai keislaman dalam menetapkan undang-undang. Hal tersebut terlihat jelas pada ayat tiga “meningkatkan keimanan dan ketakwaan” dan ayat kelima “menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa” yang dalam agama Islam semua nilai tersebut menjadi pokok ajaran. Akan tetapi, dalam implementasi undang-undang tersebut (kebijakan pendidikan) perlu diadakan pengawasan secara bersama agar tidak ada penyalahgunaan peraturan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sebuah kebijakan harus berjalan secara ideal melalui tahapan yang berlaku. Berawal dari isu dan agenda pemerintah kemudian diformulasikan menjadi sebuah kebijakan pendidikan dan diimplementasikan. Setelah itu, hal yang terpenting dari proses implementasi adalah adanya evaluasi kebijakan. Karena dengan adanya evaluasi kebijakan akan terlihat apakah suatu kebijakan dianggap relevan dan mensejahterakan atau malah mempersulit dan menyengsarakan masyarakatnya (Tilaar & Nugroho, 2012).

H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa setidaknya ada empat permasalahan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Empat permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Domestifikasi dan Stupidifikasi

Proses pendidikan yang terjadi dalam sekolah terindikasi adanya masalah domestikasi (penjinakan). Istilah tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab proses pendidikan berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang bersumber dari kekuasaan yang diberikan untuk tujuan menjinakan pribadi-pribadi liar agar tunduk dan patuh kepada tuannya. Mengapa demikian?, sebab peraturan yang mengikat sebuah proses pendidikan tanpa adanya keleluasaan untuk melaksanakan peraturan tersebut, guru dan murid tidak berbeda dengan mesin-mesin robot yang diprogram sedemikian rupa untuk mengikuti penciptanya, sehingga dapat membunuh kreativitas dan akan timbul masalah lain yaitu stupidifikasi (pembodohan).

Dengan proses belajar yang demikian, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik

sebagai budak dan alat dari penjajahan mental dari yang mempunyai kekuasaan. Stupidifikasi ini terlihat dalam proses pendidikan pada masa kolonial dengan tujuan menciptakan buruh yang murah untuk mengeksploitasi daerah jajahan. Begitu juga keadaan pendidikan saat ini, yang membedakan hanya pelaku penjajah merupakan dari bangsanya sendiri.

Pendidikan domestikasi dapat dijumpai pada pandangan dogmatis dan mendewakan ijazah. Di negara-negara berkembang, ijazah menjadi suatu penyakit, yang jika tanpa ijazah semua permasalahan tidak akan terselesaikan. Kualitas dari seseorang ditentukan dan diukur berdasarkan ijazah. Tidak peduli ijazah tersebut didapat dari proses yang jujur atau membeli melalui instansi yang tidak bertanggung jawab. Proses pendidikan tersebut, juga mulai merambah dalam lembaga-lembaga Islam, dimana saat ini mulai ikut-ikutan mensejajarkan diri dan meninggalkan ideologinya.

b. Indoktrinasi

Proses pendidikan mengenal kekuasaan dalam pengertian yang berorientasi pada advokasi, sedangkan kekuasaan yang lain berorientasi pada legitimatif. Adanya indoktrinasi biasanya melalui perantara yang tidak terduga, begitu juga dalam pendidikan, contoh nyata indoktrinasi yang ada saat ini seperti adanya kurikulum yang mengikat. Penyusunan kurikulum persekolahan di Indonesia yang silih berganti menunjukkan betapa kekuasaan yang berlaku menancapkan bukannya dalam penentu isi kurikulum sesuai dengan sistem pemerintahan. Kurikulum pada semua tingkat pendidikan merupakan rekayasa yang dibuat oleh pemerintah agar menghilangkan kebebasan dari tiap-tiap lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulumnya sendiri. Semua aspek kurikulum sudah diatur sesuai dengan proses domestikasi yang dijelaskan sebelumnya. Maka yang terjadi adalah proses mentransmisikan ilmu secara paksa.

Senada dengan proses domestikasi, dalam pendidikan islam proses indoktrinasi terutama dalam kurikulum sudah mulai menguasainya. Akan tetapi, proses indoktrinasi kurikulum tidak terlalu mengikat bagi sekolah-sekolah yang bersifat swasta atau bukan dibawah naungan Menteri Pendidikan Nasional. Sebab di sekolah-sekolah swasta masih diberi keluasaan untuk menerapkan cirinya, ke hasanya dan bahkan ideologinya.

c. Demokrasi pendidikan

Berbicara demokrasi pendidikan berarti berbicara tentang kebebasan dalam pendidikan. Kata “bebas” yang dimaksud adalah kebebasan yang disertai kesempatan-kesempatan untuk memilih. Di Indonesia demokrasi pendidikan sudah berjalan akan tetapi belum seutuhnya. Terlihat jelas pada perubahan amandemen tentang pendidikan dan kebudayaan. Dimana pemerintah memberikan 20% dari anggaran negara untuk kepentingan pendidikan. Namun seperti yang pemakalah sampaikan sebelumnya, bahwa implementasi demokrasi pendidikan belum seutuhnya bahwa dari anggaran yang begitu besar apakah benar-benar telah sampai pada sektor yang dianggarkan atau malah sebaliknya.

Melihat kenyataan yang demikian, apakah pendidikan Islam juga memperoleh hak yang sama atau hanya pendidikan yang bersifat umum dalam hal ini adalah sekolah berbasis negeri.

d. Integrasi sosial

Banyak asumsi yang menyatakan bahwa integrasi sosial terlahir melalui tangan kekuasaan, padahal tidak selalu demikian. Adakalanya integrasi sosial terlahir melalui pendidikan yang baik. Bahkan H.A.R Tilaar menegaskan bahwa integrasi sosial tidak dapat dipaksakan melalui kekuasaan. Karena dengan memaksakan integrasi sosial yang diciptakan oleh kekuasaan akan membunuh budaya-budaya lokal, sehingga kehidupan yang plural akan hilang.

Pendidikan Islam

Pengertian Pendidikan Islam

Achmadi (2008) dalam bukunya menjelaskan bahwa Pendidikan Islam merupakan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia yang sempurna sesuai dengan norma-norma Islam. Seperti yang telah diketahui bahwa fitrah manusia adalah kecenderungan untuk berbuat baik dan bertauhid berdasarkan pembawaan manusia. Oleh karena itu, pendidikan dalam islam juga harus mengarah pada tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*.

Sedangkan menurut Nata (2016), jika membahas tentang pengertian pendidikan islam maka setidaknya perlu mengembalikan kata pendidikan dari sumber asalnya yaitu kata *Al-Tarbiyah, al-Ta'lim, Al-Ta'dib* dan *Al-Tabzib* yang menjadikan makna pendidikan tidak serta-merta diartikan sebagai proses transmisi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Melainkan lebih dari itu, pendidik mengajarkan ilmu pengetahuan disertai dengan akhlak yang menjadikan peserta didik memiliki nilai moral dalam hidupnya.

Pola Pendidikan Islam Di Indonesia

Sejatinya pendidikan Islam telah ada sejak agama Islam tersebut masuk ke Indonesia. Banyak teori yang berpendapat tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Beberapa teori tersebut seperti teori Gujarat oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka, teori Persia oleh Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana, teori Maritim oleh N.A. Baloch, dari semua teori tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, akan tetapi teori-teori tersebut mengerucut dalam satu kemungkinan, masuknya Islam di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi dimana pola perdagangan jalur laut menjadi alasan terkuat masuknya Islam ke Indonesia (Negara, 2016).

Menurut Martin, Setelah masuknya ajaran Islam ke Indonesia, barulah muncul perkembangan pendidikan dengan mendirikan kajian-kajian di berbagai majlis seperti tempat perkumpulan warga dan surau (masjid). Selain itu, juga mulai muncul pusat pendidikan yang mengharuskan peserta didiknya mukim di suatu tempat agar lebih optimal dalam menimba ilmu dari gurunya, maka mulailah pada abad ke-16 muncul tempat-tempat pemukiman (pesantren) yang berfungsi sebagai pembelajaran kedua setelah surau, Meskipun sebenarnya istilah pesantren sendiri belum dikenal waktu itu (Bruinessen, 2012).

Pesantren sendiri merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyiaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan pondok pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten menjalankan

fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam sehingga dari pesantren lahir kader ulama, guru agama, mubaligh, tokoh politik dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sejarah pendirian pesantren, awalnya didirikan dengan misi khusus, yaitu: *Pertama*, sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, membentuk jiwa santri yang memiliki kualifikasi moral dan religius. *Ketiga*, menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia (Dawam & Ta'arifin, 2005). Kemampuan pesantren untuk tetap survive hingga kini tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, terutama kalangan pesantren. Hal ini sangat beralasan, sebab ditengah derasnya arus modern dan globalisasi, dunia pesantren masih konsisten dengan kitab kuning dan konsep pendidikan yang mungkin oleh sebagian orang dianggap kuno. Begitu pula dengan pelajaran kitab-kitab (klasik) merupakan salah satu elemen dasar dari tradisi pesantren. Seluruh sisi kehidupan pesantren bersifat religius-teosentris yang merujuk kepada Alquran dan Hadis, sehingga semua aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan.

Selain pesantren, ada juga sekolah islam yang bermula muncul dari adanya sekelompok masyarakat yang berlatar belakang agama yang mempunyai gagasan membuka sekolah dengan sistem "Sekolah Belanda" dengan tambahan pelajaran Agama. Pemrakarsa utama dalam modernisasi pendidikan islam adalah organisasi modernis Islam seperti: Muhammadiyah (KH. Ahmad Dahlan 1912 M), Al-Irsyad (1913 M), Mathla'ul Anwar (KH. Jasin dkk.1916 M) (Muhammad Kholid Fathoni, 2005:70).

Dalam perkembangannya, pendirian pendidikan islam di atas menjadi inspirasi bagi sebagian besar organisasi pergerakan islam. Meskipun sebenarnya lembaga pendidikan islam lain telah ada sebelum Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Mathla'ul Anwar mendirikannya. Organisasi besar lain yang turut serta menumbuh kembangkan pendidikan islam seperti: Persatuan Umat Islam (KH. Ahmad Halim 1917 M), Persatuan Islam (A. Hassan 1923 M), Nahdlatul Ulama' (KH. Hasyim Asy'ari 1926 M), dan Al-Jam'iyatul Washliyah (para pelajar dan guru-guru *Maktab Islamiyah Tapanuli* 1930 M) dengan corak dan ciri khas masing-masing. Sekolah yang mereka dirikan merupakan sekolah formal dengan memasukkan pengajaran Agama dan menambahkan nama Islam di belakangnya sehingga menjadi SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam. Selain itu, ada yang menggunakan nama organisasi penyelenggara seperti SD Muhammadiyah, SMP Ma'arif NU, SMA Al-Irsyad. Ada pula yang menggunakan perlambang berbahasa Arab, misalnya SD Al-Falah, SMP Futuhiyah. Belakangan ini muncul nama SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam terpadu) model *full day school* atau *Boarding School* (Muhammad Kholid Fathoni, 71).

Selain daripada lembaga pendidikan yang disebut di atas, ada juga pendidikan jenjang Perguruan Tinggi Islam baik swasta maupun negeri. Pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, dimana Satiman Wirjosandjojo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum muslim di Hindia Belanda yang terjajah itu. Bagi Indonesia, kebutuhan Pendidikan tinggi Islam sudah sangat mendesak untuk mendidik tenaga ahli dalam bidang Ilmu agama Islam dan sebagai pusat pengembangan intelektual Islam. Keinginan tersebut berhasil terealisasi di Minangkabau dengan didirikannya sekolah Tinggi oleh persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang diresmikan pada tanggal 9 Desember 1940 (Yunus, 1992).

Politik dalam Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia

Reformasi adalah suatu perubahan, perbaikan dan pembaharuan. Oleh karena itu, politik dalam reformasi pendidikan dapat dimaknai sebagai pembaharuan dalam dunia pendidikan yang dilatar belakangi oleh faktor politik kekuasaan (Partanto & Al Barry, 1994).

Mochtar Buchori menyatakan dalam pandangannya bahwa generasi politik yang mengatur kehidupan bangsa selama periode orde baru tumbuh pada waktu kondisi pendidikan kita sudah mulai menurun. Ekspansi sistem pendidikan yang berlangsung sangat cepat pada waktu itu, tanpa diketahui dan dikehendaki, telah merosotkan mutu sekolah-sekolah. Kemerosotan ini terjadi, karena elit pendidikan yang sangat kecil yang dimiliki saat itu, harus di rentang panjang-panjang untuk memungkinkan ekspansi sistem yang cepat tersebut (Buchori, 2000).

Pada masa Orde Baru birokrasi sebagai sarana efektif untuk melakukan intervensi kepada semua aspek kehidupan bernegara. Eksistensi penguasa concern utama bagi pemerintah, sehingga intervensi yang dilakukan oleh penguasa terhadap semua aspek kehidupan bernegara sebagai instrumen penting untuk mendorong kelestarian dan kelangsungan penguasa. Akibat dari system sentralis ini membuat sikap apatis di kalangan cendekiawan dan semua lapisan masyarakat untuk berpikir secara demokratis, kritis, dan kreatif.

Sistem pemerintahan Orde Baru ini, menghalangi munculnya gerakan oposisi sebagai social control terhadap pemerintahan atau penguasa. Oposisi dalam suatu Negara yang demokratis menjadi suatu keharusan politik yang harus ditempatkan pada posisi yang penting. Di Indonesia ini di gerakan oposisi di pandang oleh penguasa sebagai pendobrak terhadap eksistensi penguasa, sehingga munculnya oposisi selalu tidak sepi oleh kecurigaan penguasa, didukung oleh otoritarian.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya kasus yang sama terjadi dimana masih terdapatnya pemimpin kita baik dalam skala nasional maupun daerah menjadikan pendidikan Islam sebagai lahan politik, sehingga “tema-tema” pendidikan kadang-kadang menjadi slogan politik dalam upaya melanggengkan kekuasaannya, entah dalam kasus masih dalam pemerintahannya maupun ketika menjelang Pilkada. Parahnya, partai-partai yang tidak bertanggung jawab berani masuk dalam tatanan persekolahan. Membidik siswa dan siswi yang baru pertama kali mengenal dunia pilkada dengan iming-iming bantuan alat-alat yang berkaitan dengan kesuksesan dalam sekolah.

Sering dilupakan oleh kalangan pendidik bahwa salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah aspek politik. Dalam aspek ini di jelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan, hubungan antar Negara, hubungan antar organisasi, dan sebagainya. Atas dasar ini, antara pendidikan islam dengan politik punya hubungan erat yang sulit untuk dipisahkan.

Di Indonesia, munculnya madrasah merupakan konsekuensi dari proses modernisasi surau yang cenderung disebabkan oleh terjadinya tarik menarik antara sistem pendidikan tradisional dengan modern. Namun, disadari oleh Ki Hajar Dewantara bahwa peran ulama telah melahirkan system budaya kerakyatan yang bercorak kemasyarakatan dan politik, di samping spiritual. Hal ini terbukti bayangkanya para alumni pesantren yang melanjutkan studi ke universitas terkemuka baik di dalam mupun di luar negeri (Rahardjo, 1993). Selain itu, pendidikan islam di Indonesia sangat beragam, memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan lembaga yang mendirikannya.

Konsekuensi dari keragaman orientasi pendidikan adalah munculnya para tokoh formal dan informal yng memiliki pemikiran dan pergerakan politik yang berbeda, ada yang berfikir lebih modernis, fundamentalis, tradisional dan nasionalis. Meski perilaku politik seorang tokoh semata-mata tidak hanya ditentukan oleh institusi pendidikan tertentu dan masih ada faktor lain (lingkungan, sosiokultural, potensi berpikir, dan sebagainya), pengaruh suatu

institusi pendidikan cukup berarti dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang untuk mempunyai paradigma berfikir yang berbeda (Noer, 1983).

PENUTUP

Politik kekuasaan merupakan cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Ketika menjalankan kekuasaannya, pemerintah memerlukan unsur-unsur yang berguna untuk menopang kekuasaan, salah satunya dengan masyarakat yang cerdas dan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedangkan memperoleh masyarakat yang cerdas dan mampu menjalankan roda pemerintahan tidak ada cara lain selain dengan mendidik masyarakatnya. Namun, dalam kenyataannya, proses pendidikan malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melanggengkan kekuasaannya. Cara yang dilakukan dengan membuat sistem atau kebijakan yang jika ditinjau lebih jauh berisi kebijakan yang membela dan membenarkan kekuasaannya.

Sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berada dalam kekuasaan tersebut. Meskipun munculnya pendidikan Islam sebenarnya tidak berasal dari kekuasaan, melainkan dari ajaran agama yang kemudian dinilai baik sehingga diterapkan dan menjadi falsafah kenegaraan. Tetap saja pendidikan Islam berada dalam cengkraman kekuasaan. Seperti dalam mendirikan sebuah lembaga pesantren atau institusi diharuskan meminta izin kepada kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan islam dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan sebab terjadi saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanis Teoritis*. Pustaka Pelajar.
- Basir, A., & Ramadan, W. (2017). Pembentukan Karakter Kepemimpinan Siswa Melalui Sekolah Alam (Studi Kasus di Sekolah Dasar Alam Muhammadiyah Banjarbaru). *Jurnal Muadalah*, IV(1), 1–14. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/psj/article/view/2118/1540>
- Bruinessen, M. V. (2012). *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Gading Publishing.
- Buchori, M. (2000). *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia, dalam Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Kanisius.
- Dawam, A. R., & Ta'arifin, A. (2005). *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Listafariska.
- Dewantara, K. H. (1977). *Bagian I: Pendidikan cetakan kedua*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dinas Pendidikan. (2005a). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Pustaka Pelajar.
- Djumhur, & Danasuparta, D. (1959). *Sejarah Pendidikan*. CV Ilmu.
- Febriana, A. (2022). *Kasus Dugaan Kekerasan Guru terhadap Murid*. <https://www.kompasiana.com/anisfebriana7716/62d5e58a6e7f014c277d6601/kasus-dugaan-kekerasan-guru-terhadap-murid>
- Hoetomo. (2005b). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar.
- Irawan, Y. K. (2018). *Ditegur Karena Main Ponsel Di Kelas Murid Hajar Guru dengan Kursi*. <https://regional.kompas.com/read/2018/03/08/12274191/ditegur-karena-main-ponsel-di-kelas-murid-hajar-guru-dengan-kursi?page=all>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Sekretariat Jendral MPR RI.
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Prenada Media.
- Negara, A. M. S. (2016). *Api Sejarah*. CV Tria Pratama.
- Noer, D. (1983). *Administrasi Islam di Indonesia*. Yayasan risalah.
- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola.

- Purnamasari, I. (2017). *Homeschooling dalam Potret Politik Pendidikan: Studi Etnografi pada Pelaku Homeschooling di Yogyakarta*.
- Rahardjo, M. D. (1993). *Intelektual Intelejensia Dan Perilaku Politik Risalah Cendekiawan Muslim*. Mizan.
- Ramadan, W. (2020). Sekolah Alam di Kalsel; Latar Belakang, Ekspektasi dan Persepsi. *Madrasah*, 12(1), 40–51. <https://doi.org/10.18860/mad.v12i1.7656>
- Ramadan, W., & Mof, Y. (2022). Sekolah Islam: Sebuah Tinjauan Ideologis dan Pendidikan Humanis pada Sekolah Dasar Islam Creative Banjarbaru. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2), 124. <https://doi.org/10.31602/muallimuna.v7i2.6606>
- Rifai, M. (2011). *Politik Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz Media.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan analisis dinamika formulasi dan implementasi*. Aswaja Pressindo.
- Salahudin, A. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Yunus, M. (1992). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Mutiara Sumberwidya.